

RENCANA KERJA (Renja)
PERUBAHAN
KECAMATAN LIANG ANGGANG
TAHUN 2025



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
KECAMATAN LIANG ANGGANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 dapat terselesaikan.

Dokumen Renja ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Liang Anggang tahun 2025 dapat dilaksanakan Implementasi dari Visi dan Misi Kota Banjarbaru, sangat disadari bahwa informasi yang disajikan dalam laporan ini belum sepenuhnya memuaskan semua pihak yang terkait serta tidak luput dari kekurangan, oleh karna itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan dimasa yang akan datang, rencana kerja Kantor Kecamatan Liang Anggang Tahun 2025 diterbitkan sebagai normal, standar, prosedur, kreteria, dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Camat Kecamatan Liang Anggang pada tahun 2025.

Banjarbaru, Juni 2025
CAMAT LIANG ANGGANG,

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP
Pembina
NIP. 19831229 200212 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematis Penulisan	10
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN LIANG ANGGANG TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Liang Anggang Tahun Lalu	11
2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	11
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan dan Pencapaian Kinerja Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025	15
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru	20
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Liang Anggang	23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	41
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	41
3.3 Program dan Kegiatan	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LIANG ANGGANG	44
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan	44
BAB V PENUTUP	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Hal ini tertuang dalam Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kecamatan Liang Anggang merupakan salah satu kecamatan dari 5 (lima) kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru, berdasarkan gradenya Kecamatan Liang Anggang termasuk pada tipe A yang mempunyai total luas sebesar 74.83 M2 atau sekitar 23,12 persen dari total luas Kota Banjarbaru dengan jumlah penduduk sebesar 47.398 jiwa pada tahun 2023. Kecamatan Liang Anggang terdiri atas 4 kelurahan yaitu, *Kelurahan Landasan Ulin Tengah, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kelurahan Landasan Ulin Barat, dan Kelurahan Landasan Ulin Selatan* dan 81 RT serta 16 RW.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Upaya untuk berpartisipasi dalam mewujudkan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menjadi hal yang penting. Sebagai pelayan masyarakat, pemerintah dituntut untuk lebih berperan aktif dan memiliki pemikiran yang berkembang tanggap terhadap perubahan yang demikian cepat, sekaligus mampu beradaptasi dalam berbagai aktivitasnya. Upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab perlu suatu media pertanggungjawaban yang sistematis dan melembaga.

Pentingnya hal tersebut telah disadari oleh pemerintah sebagaimana tercermin dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas, maka perlu dibuat Rencana Kinerja yang memuat rencana kerja dan kegiatan tahunan.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah Kota Banjarbaru memiliki wewenang lebih luas dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan ditingkat daerah kecuali urusan yang ditetapkan menjadi Kewenangan Pusat dan Propinsi (UU No. 32/2004). Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 ini meliputi: demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah. Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan di era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal.

Kesejahteraan rakyat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang sekurang-kurangnya harus meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, peningkatan kesempatan kerja, serta peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Banjarbaru adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral.

Untuk mendorong pembangunan di Kota Banjarbaru dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih menekankan perhatian pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh

elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru.

Dengan demikian diharapkan seluruh elemen masyarakat Kota Banjarbaru akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Banjarbaru untuk menjadi kota yang unggul dibidang perdagangan, jasa, pemukiman, pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Banjarbaru khususnya Kecamatan Liang Anggang.

1.2. Landasan Hukum

Kecamatan Liang Anggang terbentuk dari pemecahan/ pemekaran Kecamatan Landasan Ulin dengan Peraturan Daeran Kota Banjarbaru No. 04 Tahun 2007 Tentang Pemecahan dan Pembentukan 2 (dua) Kecamatan Baru di Kota Banjarbaru Tanggal 10 Mei 2007.

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru disebutkan bahwa kedudukan Pemerintah Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota.

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih menitikberatkan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagian Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dikelompokkan dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat, pertanahan dan perizinan.

Kemudian ditindak lanjuti lagi dengan Peraturan Walikota Banjarbaru

Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Pembuatan rencana strategis Kecamatan Liang Anggang untuk pengembangan Kota Banjarbaru ini dibuat dengan menggunakan pendekatan berdasarkan *Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System)* dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. UU tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional serta dapat mendorong efektifitas dan efesiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dapat dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif. Berikut ini gambaran keterkaitan antar dokumen menurut UU No.25 tahun 2004.

Secara Yuridis keberadaan Kecamatan Liang Anggang sebagai salah satu wilayah Kota Banjarbaru bersamaan dengan terbentuknya Kota Banjarbaru sebagai daerah otonom berdasarkan Undang - undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822).

Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kelurahan dalam wilayah Kota Banjarbaru disebutkan bahwa kedudukan Pemerintah Kecamatan merupakan Unsur Perangkat Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah mdan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kota.

Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Walikota Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih menitikberatkan pada pemberian pelayanan kepada masyarakat. Sebagian Kewenangan Walikota yang dilimpahkan kepada Camat dikelompokkan dalam bidang pemerintahan, bidang ekonomi, pembangunan, pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan masyarakat, pertanahan dan perizinan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama dari pembuatan Rencana Kerja ini adalah untuk membangun sebuah Rencana Kerja yang disusun dengan menggunakan pendekatan *Sistem Manajemen Strategis (Strategic Management System)* yang sistematis dan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan nasional yang tertera pada UU No. 25 Tahun 2004. Rencana Kerja SKPD ini menjadi dasar mekanisme pengecekan dan perimbangan (*check and balances*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Diharapkan dapat membatasi peluang pengelolaan yang salah, dan peluang penyalahgunaan sumber daya serta memastikan kegiatan pembangunan sejalan dan searah dengan visi atau tujuan akhir yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Banjarbaru. Berikut ini adalah tujuan adanya rencana kerja Kecamatan Liang Anggang yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT) didalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.
2. Merumuskan instrumen dan komitmen kebijakan anggaran jangka menengah yang dapat mengikat eksekutif dan legislatif .
3. Merumuskan kerangka strategi dan program jangka menengah yang mengandung sasaran, outcomes dan outputs yang spesifik dan memiliki target terukur supaya memudahkan didalam menilai kinerja organisasi.
4. Merumuskan kebijakan, strategi dan program pembangunan ditingkat Rukun Tetangga (RT) yang dapat mensinergikan sumber daya atau potensi yang dimiliki dengan peluang pengembangan wilayah Banjarbaru untuk mewujudkan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh warga Kecamatan Liang Anggang.

5. Merumuskan sebuah dokumen Rencana Strategis yang dapat dijadikan acuan untuk proses koordinasi antar program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Liang Anggang supaya tercipta sinergi untuk pencapaian tujuan akhir yang diinginkan.
6. Merumuskan dokumen rencana strategis yang dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan secara vertikal dan horizontal.
7. Meletakkan fondasi dan fokus tujuan pembangunan yang hendak dicapai.
8. Mengoptimalkan upaya dan kinerja pembangunan di Kota Banjarbaru.
9. Mengarahkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen organisasi untuk pencapaian visi dan misi organisasi.
10. Memudahkan didalam mengkomunikasikan dan mensosialisasikan ke seluruh elemen internal maupun eksternal organisasi untuk meningkatkan komitmen dan motivasi semua pihak untuk mencapai tujuan akhir organisasi. Melalui Kelurahan-Kelurahan sampai dengan ketingkat RT/RW

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Liang Anggang serta susunan garis besar isi dokumen :

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Pelaksanaan Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Bab III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Dearah

Bab IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Liang Anggang
- 4.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Liang Anggang

Bab V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EVALUASI CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. Pelaksanaan Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tahun 2025 telah dianggarkan Dana Murni sebesar Rp 9.717.901.745,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 9.308.363.745,00 Belanja Modal Rp 409.538.000,00 yang terdiri dari 4 (empat) program, 12 (dua belas) kegiatan, dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan.

Pelaksanaan Rencana Kerja di pertengahan tahun hanya mengalami perubahan pergeseran untuk menyesuaikan kegiatan yang sifatnya Bantuan Sosial untuk masyarakat di alihkan menjadi Kegiatan Swakelola tipe IV, serta merinci kegiatannya dengan standar SSH yang telah ditentukan di dalam SIPD Ri Tahun 2025.

Dari kegiatan tahun 2025 (sampai dengan triwulan II) yang telah dilaksanakan Kantor Kecamatan Liang Anggang dapat diuraikan sebagai berikut :

- Realisasi keuangan dapat di diperoleh realisasi penyerapan Sub kegiatan sampai dengan triwulan II sebesar Rp. 4.559.460.709,00 dengan pencapaian 46,25%

Formulir E.81 / Tabel 2.1.2

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
Renja Perangkat Daerah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru
Periode Pelaksanaan Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indakor Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Income)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
									I		II		III		IV									
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x 100%		15
				K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K (%)	Rp	K	Rp	
I		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		8.208.572.770	100%	6.667.112.796	100%	7.184.562.770	19,29	1.583.821.172	28,27	2.320.798.337	-	-	-	-	19,29	3.904.619.509					
I		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan kinerja tepat waktu	100%	271.399.750	100%	94.880.000	100%	271.399.750	16,64	45.165.700	23,94	64.980.000					16,64	110.145.700					
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Yang Dibuat	100%	4.999.750	100%	5.000.000	100%	4.999.750	16,00	800.000	-	-					16,00	800.000					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%	266.400.000	100%	89.880.000	100%	266.400.000	16,65	44.365.700	24,39	64.980.000					16,65	109.345.700					
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu	100%	6.498.542.150	100%	5.710.879.420	100%	6.251.662.150	22,07	1.434.520.479	31,58	2.052.204.416					22,07	3.486.724.895					
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	6.489.303.800	100%	5.701.632.520	100%	6.242.423.800	22,08	1.432.961.479	31,62	2.052.204.416					22,08	3.485.165.895					
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	100%	4.999.850	100%	5.000.000	100%	4.999.850	16,90	845.000	-	-					16,90	845.000					

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%	4.238.500	100%	4.246.900	100%	4.238.500	16,85	150.409.037	-	150.409.037					16,85	714.000					
III		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	7.697.500	100%	22.554.839	100%	7.697.500	15,90	1.224.000	-	-					15,90	1.224.000					
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%	7.697.500	100%	22.554.839	100%	7.697.500	15,90	1.224.000	-	-					15,90	1.224.000					
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Administrasi Umum dan Pelayanan Publik	100%	227.482.300	100%	117.979.638	100%	227.482.300	8,48	19.300.030	44,32	100.822.736					8,48	120.122.766					
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor selama setahun terpenuhi	100%	105.227.000	100%	17.034.500	100%	105.227.000	1,89	1.993.500	82,09	86.379.000					1,89	88.372.500					
		Penyediaan Barang Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama setahun	100%	70.259.500	100%	51.118.700	100%	70.259.500	13,34	9.374.000	5,98	4.200.000					13,34	13.574.000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Menunjang Operasional Kantor	100%	5.765.800	100%	5.765.500	100%	5.765.800	-	-	-	-					-	-					
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan baru	100%	1.980.000	100%	1.998.000	100%	1.980.000	20,20	400.000	-	-					20,20	400.000					
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah dapat terlaksana	100%	44.250.000	100%	42.062.938	100%	44.250.000	17,02	7.532.530	23,15	10.243.736					17,02	17.776.266					
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Gedung kantor	100%	125.050.600	100%	406.986.000	100%	125.050.600	24,63	30.800.000	57,42	71.800.000					24,63	102.600.000					
		Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Mebel	100%	13.709.600	100%	44.800.000	100%	13.709.600	-	-	-	-					-	-					
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%	65.543.000	100%	32.240.000	100%	65.543.000	-	-	94,59	62.000.000					-	62.000.000					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	31.170.000	100%	277.000.000	100%	31.170.000	98,81	30.800.000	-	-					98,81	30.800.000					
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%	14.628.000	100%	52.946.000	100%	14.628.000	-	-	66,99	9.800.000					-	9.800.000					

VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Jasa Penunjang Gedung Kantor	100%	199.681.020	100%	150.409.037	100%	199.681.020	17,65	35.244.001	5,18	10.339.185					17,65	45.583.186					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kebutuhan Listrik, Air OPD yang Terpenuhi	100%	68.400.000	100%	57.453.331	100%	68.400.000	23,36	15.977.339	8,68	5.939.185					23,36	21.916.524					
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor	100%	131.281.020	100%	92.955.706	100%	131.281.020	14,68	19.266.662	3,35	4.400.000					14,68	23.666.662					
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sarana Penunjang Gedung Kantor	100%	878.719.450	100%	163.423.862	100%	878.719.450	2,00	17.566.962	2,35	20.652.000					2,00	38.218.962					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Mobil Jabatan Dalam Kondisi Layak dan Baik	100%	45.863.700	100%	37.797.950	100%	45.863.700	15,26	7.000.000	7,63	3.500.000					15,26	10.500.000					
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional Dalam Kondisi Layak dan Baik dan Dapat Digunakan Lapangan	100%	98.705.750	100%	50.105.912	100%	98.705.750	10,71	10.566.962	9,88	9.752.000					10,71	20.318.962					
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dalam kondisi baik	100%	2.000.000	100%	2.090.000	100%	2.000.000	-	-	-	-					-	-					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung dan bangunan dalam kondisi baik	100%	730.900.000	100%	72.180.000	100%	730.900.000	-	-	1,01	7.400.000					-	7.400.000					
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung dan bangunan dalam kondisi baik	100%	1.250.000	100%	1.250.000	100%	1.250.000	-	-	-	-					-	-					
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	meningkatkan pelayanan kegiatan di tingkat Kecamatan	100%	1.597.287.250	100%	1.540.240.500	100%	1.597.287.250	17,42	278.264.400	22,74	363.276.800					17,42	641.541.200					
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		100%	1.597.287.250	100%	1.540.240.500	100%	1.597.287.250	16,71	266.956.500	21,85	349.068.000					16,71	616.024.500					
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100%	1.479.204.000	100%	1.201.334.500	100%	1.479.204.000	18,05	266.956.500	23,60	349.068.000					18,05	616.024.500					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan Publik	100%	118.083.250	100%	338.906.000	100%	118.083.250	9,58	11.307.900	12,03	14.208.800					9,58	25.516.700					

		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Di Laksanakan	100%	31.399.700	100%	67.395.000	100%	31.399.700	10,01	3.144.000	9,89	3.105.000					10,01	6.249.000					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	52.500.000	100%	237.011.000	100%	52.500.000	12,00	6.299.900	14,01	7.357.300					12,00	13.657.200					
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100%	34.183.550	100%	34.500.000	100%	34.183.550	5,45	1.864.000	10,96	3.746.500					5,45	5.610.500					
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Peningkatan Pembinaan Kelurahan	100%	112.899.000	100%	102.133.490	100%	112.899.000	-	-	-	-					-	-					
		Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	100%	7.968.000	100%	7.980.000	100%	7.968.000	-	-	-	-					-	-					
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	100%	104.931.000	100%	94.153.490	100%	104.931.000	-	-	-	-					-	-					
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		100%	104.931.000	100%	94.153.490	100%	104.931.000	-	-	-	-					-	-					
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Cakupan Data Ketentrman dan Keteritban Umum yang Diverifikasi	100%	186.314.700	100%	175.529.900	100%	186.314.700	-	-	7,14	13.300.000					-	13.300.000					
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Koordinasi Ketentrman dan Keteritban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	186.314.700	100%	175.529.900	100%	186.314.700	-	-	7,14	13.300.000					-	13.300.000					
		Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Peningkatan Koordinasi Ketentrman dan Keteritban Umum di Wilayah Kecamatan	100%	186.314.700	100%	175.529.900	100%	186.314.700	-	-	7,14	13.300.000					-	13.300.000					
Rata-rata capaian kinerja (%)										18,77%		27,06%						46,25%						
Predikat kinerja																								
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program					9.918.759.020		8.309.486.786		9.858.193.720		1.862.085.572		2.684.075.137						4.559.460.709					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																								
Faktor penghambat keberhasilan kinerja																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kota banjarbaru berikutnya																								

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Dari hasil rekapitulasi hasil capaian Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang telah dilakukan analisis sebagai bahan evaluasi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih menjumpai beberapa hambatan dan kendala yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang masih terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas.

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru mengampu tugas untuk mendukung dan memfasilitasi kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru, sehingga dalam pencapaian target dan kinerja bergantung pada berjalan tidaknya kegiatan Kecamatan Liang Anggang.

Munculnya peraturan-peraturan baru sehingga harus melakukan penyesuaian.

b. Tantangan dan Peluang Tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah berikut:

Tantangan :

1. Dinamika kegiatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru yang begitu dinamis.
2. Profesionalisme, integritas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Peluang

1. Adanya upaya peningkatan kapasitas Sumberdaya manusia di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
2. Ketepatan dan kepastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.
3. Partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

4. Publikasi kegiatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru melalui media sosial.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada uraian ini, akan disampaikan mengenai rekomendasi dan kebijakan strategis yang akan ditindaklanjuti dalam perumusan perubahan program dan kegiatan tahun 2025, sebagai berikut:

a. Rekomendasi

Meningkatkan kapasitas Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru. Peningkatan kapasitas ini diartikan sebagai peningkatan fungsi, peran dan kontribusi operasional Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru untuk mencapai tujuan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Kebijakan Strategis

Kebijakan yang diambil Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dalam menindaklanjuti rekomendasi, yaitu:

1. Efektifitas organisasi dan manajemen dengan optimalisasi tata kerja dan tata kelola.
2. Meningkatkan kualitas dan fungsi aparatur melalui kompetensi pengetahuan dan keahlian.
3. Menyempurnakan sistem dan metode (tata laksana) operasional organisasi, Pembaruan sarana dan prasarana penunjang operasional.
4. Penambahan daya dukung finansial dan non finansial.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia diantaranya melalui pendidikan pelatihan dan studi banding serta konsultasi.
6. Perlu mewujudkan konsistensi pelaksanaan dan perencanaan kegiatan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2025 KOTA BANJARBARU

NAMA SKPD : KECAMATAN LIANG ANGGANG

Kode	Urusan/ Bidang urusan pemerintahan daerah Program / kegiatan/ Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2024					Prakiraan Maju Tahun 2025		Jenis keg
				Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif		Jumlah Perubahan (+/-)	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	a/b/c
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB Nilai	BB Nilai	7.749.811.432	9.915.097.800	1.953.405.030	BB Nilai	6.525.967.302	
		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi								
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Jumlah Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & khtisar Realisasi Kinerja SKPD. Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen 2 Laporan	3 Dokumen 2 Laporan	271.399.750	296.336.750	24.937.000	3 Dokumen 2 Laporan	24.586.232	
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	4.999.750	13.016.750	8.017.000	3 Dokumen	10.677.282	

7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	266.400.000	283.320.000	16.920.000	2 Laporan	13.908.950	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	1 Laporan 4 Laporan 54 Orang/Bulan	1 Laporan 4 Laporan 54 Orang/Bulan	6.251.662.150	6.683.883.655	432.221.505	1 Laporan 4 Laporan 54 Orang/Bulan 1 Tahun	5.933.735.898	
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	54 orang/Bulan	56 orang/Bulan	6.242.423.800	6.674.645.305	432.221.505	56 orang/Bulan	5.918.643.601	
7.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	4.999.850	4.999.850	0	1 Laporan	10.419.068	

7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	4.238.500	4.238.500	0	4 Laporan	4.673.229	
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	7.697.500	7.697.500		4 Laporan	65.700.000	
7.01.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	7.697.500	7.697.500	0	4 Laporan	65.700.000	
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan. Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang di sediakan. Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor yang di sediakan. Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	Jumlah Eksemplar Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di sediakan. Jumlah Paket Barang Cetakan & Penggandaan yang di sediakan. Jumlah Paket Peralatan & Perlengkapan Kantor yang di sediakan. Jumlah Terlaksananya Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	5 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Dokumen 4 Laporan	5 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Dokumen 4 Laporan	227.482.300	227.482.300	-	5 Paket 6 Paket 1 Paket 1 Dokumen 4 Laporan	142.916.190	
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	105.227.000	105.227.000	0	5 Paket	24.726.652	
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	70.259.500	70.259.500	0	6 Paket	69.705.534	

7.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5.765.800	5.765.800	0	1 Paket	12.216.916	
7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1.980.000	1.980.000	0	1 Dokumen	3.194.400	
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	4 Laporan	4 Laporan	44.250.000	44.250.000	0	4 Laporan	33.072.688	
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah	Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Cakupan Pelayanan Internal yang difasilitasi Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	100 % B Nilai	101 % B Nilai	125.050.600	1.396.389.800	111.339.200	-		
7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	4 Unit	-	1.160.000.000	1.160.000.000	-		
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	13.709.600	72.218.400	58.508.800	5 Unit	-	
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 Unit	6 Unit	65.543.000	118.373.400	52.830.400	6 Unit	-	
7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	31.170.000	31.170.000	0	3 Unit	-	
7.01.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	3 Unit	14.628.000	14.628.000	0	3 Unit	-	

7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang di sediakan. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di sediakan	3 Laporan/Bulan 5 Laporan/Bulan	3 Laporan/Bulan 5 Laporan/Bulan	199.681.020	204.181.020	4.500.000	3 Laporan/Bulan 5 Laporan/Bulan	225.791.988	
7.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan/Bulan	68.400.000	68.400.000	0	3 Laporan/Bulan	95.832.000	
7.01.01.2.08.04	Penyediaan jasa Layanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	131.281.020	135.781.020	4.500.000	5 Laporan	129.959.988	
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan Penyediaan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	878.719.450	1.099.126.775	220.407.325	1 Tahun	133.236.994	
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	45.863.700	51.509.100	5.645.400	1 Unit	38.178.404	
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 unit	7 unit	98.705.750	113.234.000	14.528.250	0 unit	68.293.610	
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	2.000.000	3.000.000	1.000.000	5 Unit	3.061.300	

7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dalam kondisi baik	Terpeliharanya Gedung Kantor dalam kondisi baik	3 Unit	4 Unit	730.900.000	930.133.675	199.233.675	3 Unit	22.000.000	
7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	1.250.000	1.250.000	0	4 Unit	1.703.680	
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan PublikIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Kepatuhan Terhadap Pelayanan PublikIndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88 Nilai82,54 Nilai	88 Nilai82,54 Nilai	1.597.287.250	1.661.837.250	21.160.000	88,5 Nilai83 Nilai	135.952.850	
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah & Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. Jumlah Laporan Koordinasi/ Sinergi Perencanaan & Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah & Instansi Vertikal Terkait	10 Dokumen	10 Dokumen	1.479.204.000	1.533.754.000	11.160.000	10 Dokumen	-	
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	1.479.204.000	1.533.754.000	54.550.000	10 Dokumen	-	

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Di Laksanakan. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Di limpahkan. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Kecamatan.	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Di Laksanakan. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Di limpahkan. Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan. Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintah di Kecamatan.	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	118.083.250	128.083.250	10.000.000	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan	135.952.850	
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perijinan Non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	12 Dokumen	12 Dokumen	31.399.700	31.399.700	0	12 Dokumen	35.640.000	
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perijinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	12 Laporan	52.500.000	62.500.000	10.000.000	12 Laporan	50.702.850	
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12 Laporan	12 Laporan	34.183.550	34.183.550	0	12 Laporan	49.610.000	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah RT Mandiri	Jumlah RT Mandiri	12 RT	12 RT	112.899.000	112.899.000	0	12 RT	-	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Peningkatan Pembinaan Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	7.968.000	7.968.000	0	1 Laporan	-	
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan	1 Laporan	7.968.000	7.968.000	0		-	

7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Peningkatan Kinerja Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	12 Lembaga	12 Lembaga	104.931.000	104.931.000	0	12 Lembaga	-	
7.01.03.2.03.01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	12 Lembaga Kemasyarakatan	12 Lembaga Kemasyarakatan	104.931.000	104.931.000	0		-	
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Permasalahan Ketentraman & Ketertiban Umum yang terselesaikan	Persentase Permasalahan Ketentraman & Ketertiban Umum yang terselesaikan	100%	100%	186.314.700	186.314.700	0	100%	23.419.000	
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	Terpenuhinya Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	186.314.700	186.314.700	0	2 Laporan	23.419.000	
7.01.04.2.01.02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan	2 Laporan	186.314.700	186.314.700	0	2 Laporan	23.419.000	
						9.858.193.720	11.876.148.750	2.017.955.030		6.685.339.152	

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2022 tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5.11% dibandingkan pencapaian pada tahun 2021 yang mencapai 3.48%. Sedangkan Kota Banjarbaru mengalami lonjakan pertumbuhan ekonomi yang positif, mencapai 7.93% pada tahun 2022 dibandingkan 3.32% pada tahun 2021. Peningkatan ini dipengaruhi oleh perbaikan perlahan ekonomi global dan domestic didukung oleh program vaksinasi COVID-19 yang berkelanjutan. Namun, adanya risiko konflik antara Rusia dan Ukraina berpengaruh pada perekonomian. Harga minyak dunia yang masih tinggi dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik khususnya antara Rusia dan Ukraina, menyebabkan harga eceran BBM dan BBRT meningkat dan memberikan tekanan pada harga barang dan jasa lain.

A. Produk Domestik Regional Bruto

Secara umum, PDRB Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 adalah senilai 11,79 Trilyun atas dasar harga berlaku dan 6,82 Trilyun atas dasar harga konstan. Dari nilai PDRB ini, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan, yakni sebagai berikut:

1. Menurut PDRB atas dasar harga berlaku, terdapat lima sektor utama pembentuk perekonomian Kota Banjarbaru, yang terbesar adalah sektor transportasi dan pergudangan yang mencapai 20% dari share PDRB, selanjutnya diikuti oleh sektor konstruksi yang mencapai 15% dari share PDRB, dan sektor perdagangan besar dan administrasi pemerintahan yang masing-masing memiliki andil sebesar 11%, diikuti oleh sektor jasa pendidikan yang memiliki share PDRB sebesar 10%.
2. Berdasarkan harga berlaku tersebut, dapat dilihat bahwa nilai PDRB sektor transportasi dan pergudangan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, mencapai 26.24%.

B. Inflasi

Menurut buku "Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan

Selatan" yang diterbitkan oleh Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, inflasi Kota Banjarbaru disejajarkan dengan inflasi Kota Banjarmasin. Selama lima tahun dari 2018 hingga 2022, tingkat inflasi Kota Banjarmasin mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018, inflasi Kota Banjarmasin sebesar 2,63%, kemudian naik tajam menjadi 4,15% pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2022, inflasi meningkat tajam menjadi 6,98%, yang disebabkan oleh mobilitas masyarakat yang diprediksi menjadi sumber tekanan utama, didukung oleh perbaikan kondisi pandemi COVID-19. Harga minyak dunia yang masih tinggi juga mempengaruhi inflasi, karena meningkatnya ketidakpastian akibat kondisi geopolitik seperti Rusia-Ukraina, serta pasokan global yang belum mampu mengimbangi kenaikan permintaan seiring dengan pemulihan ekonomi global, sehingga perlu dilakukan penyesuaian harga jual eceran BBM bersubsidi.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Selama lima tahun terakhir, kondisi ekonomi makro Kota Banjarbaru mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama karena adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi kinerja perekonomian pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan mencapai -1.83%, namun mengalami perbaikan pada tahun 2021 dengan mencapai 3.32%. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi terus meningkat hingga mencapai 7.93%. Kenaikan pertumbuhan ekonomi ini dapat dilihat sebagai sebuah tanda pemulihan setelah adanya pandemi Covid-19. Meskipun fluktuasi yang terjadi di masa lalu, perbaikan yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat berkelanjutan ke depannya. Sebagai langkah strategis, pemerintah dan pelaku industri perlu terus meningkatkan kinerja perekonomian dan membangun sistem ekonomi yang lebih kuat dan tahan terhadap tantangan di masa depan.

D. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan utama perekonomian kota Banjarbaru pada tahun 2023 dan 2024 mendatang diperkirakan akan masih berkaitan dengan pemulihan pasca pandemi COVID-19, di mana angka pengangguran dan kemiskinan masih perlu diperhatikan. Laju pertumbuhan ekonomi yang melesat pada

tahun 2022 diperkirakan akan sedikit melambat pada tahun 2023 dan 2024. Pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada tahun 2022 yang dipacu oleh sektor transportasi dan perdagangan bisa jadi merupakan kejadian anomali yang disebabkan oleh meningkatnya mobilitas masyarakat karena relaksasi pasca pandemi COVID-19. Namun, penetapan Banjarbaru sebagai ibu kota provinsi dapat memberikan keuntungan bagi perekonomian Kota Banjarbaru. Hal ini dikarenakan peningkatan infrastruktur dan peningkatan investasi yang dapat membuka peluang lapangan kerja baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Selain itu, ada juga potensi peningkatan sektor pariwisata yang akan membawa dampak positif bagi perekonomian Banjarbaru. Namun, di sisi lain, peningkatan aktivitas pembangunan dan investasi juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan polusi dan kemacetan lalu lintas. Oleh karena itu, pemerintah perlu mempertimbangkan dan mengambil tindakan strategis untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif dari peningkatan perekonomian Banjarbaru. Dengan begitu, diharapkan bahwa Banjarbaru dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kota Banjarbaru diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dari semua pendapatan tersebut, yang memberikan kontribusi cukup besar berasal dari instansi yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber pendapatan daerah yang berasal dari PAD masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan bantuan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banjarbaru selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk membiayai belanja gaji pegawai. Dari kondisi tersebut maka pengelolaan pendapatan daerah harus dioptimalkan kinerjanya dalam meningkatkan penerimaan, khususnya yang berasal dari

Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kelangsungan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Banjarbaru. Gambaran pengelolaan pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

B. Arah Kebijakan Belanja Dearah

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi dan belanja hibah. Belanja modal digunakan untuk penyelenggaraan pembangunan yang diprioritaskan untuk

melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan daerah dan Belanja Daerah dalam hal terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman dan obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah angsuran hutang, penyertaan modal dan transfer ke Dana Cadangan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Liang Anggang

Dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024, telah ditetapkan Tema RKPD Kota Banjarbaru Tahun 2024, yaitu:

**“PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR DAN SOSIAL DAERAH
UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF DAN
BERKELANJUTAN DALAM KERANGKA IKP”**

Tema Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 tersebut memenuhi agenda Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota 2021-2024, dan mengakomodir aspirasi Masyarakat semaksimal mungkin dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran yang merupakan ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru memiliki peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka untuk menyukseskan pembangunan di Kota Banjarbaru, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru berupaya mewujudkan pelayanan yang optimal terhadap tugas dan fungsi Pemerintah Kota Banjarbaru demi tujuan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Liang Anggang
Kota Banjarbaru

NO	Indikator	Target Renstra	Realisa Capaian
		Tahun 2024	Tahun 2024
(1)	(2)	(8)	(12)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	88	95,5
2.	Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik	82,5	71
3.	Persentase Penyelesaian Dokumen Kependudukan Tepat waktu	100	100
4.	Persentase Penyelesaian Dokumen Perijinan Tepat waktu	100	100
5.	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	100	100
6.	Persentase Pembinaan Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban	100	100

4.2 Program dan Kegiatan Kecamatan Liang Anggang

A. Faktor-faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program dan Kegiatan

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah melakukan evaluasi terhadap kinerja dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi ini tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun setiap tahun. Laporan tersebut merupakan implementasi

akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada instansi pemerintah. LKjIP Kecamatan Liang Anggang sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Penetapan indikator kinerja merupakan salah satu instrumen manajemen dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis guna terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

Pencapaian kinerja merupakan wujud sinergi Kecamatan Liang Anggang dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi selama periode Renstra 2021- 2026. Namun demikian, Upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih terukur, berkualitas, dan memiliki target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dilakukan upaya penyelesaiannya.

Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dan tertuang di dalam LKjIP, menunjukkan tingkat capaian kinerja yang tercermin dalam indikator kinerja dalam beberapa tahun terakhir yang sesuai dengan target kinerja dan didukung oleh pencapaian Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru.

Keberhasilan pencapaian kinerja baik dari indikator kinerja dan anggaran menunjukkan pengembangan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sudah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi berbagai kendala untuk capaian kinerja selanjutnya, yakni masih kurangnya motivasi kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas serta belum optimalnya koordinasi antara pegawai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Adapun terhadap kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru telah melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya penguatan pada perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian, sehingga benar-benar merupakan

suatu rangkaian proses yang menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam menentukan tingkat keberhasilan Pencapaian Kinerja.

2. Untuk dukungan sumber daya manusia diharapkan ASN dalam memberikan dukungan layanan, inisiatif, komunikasi, kerjasama, ketepatan dan kecepatan menyiapkan dukungan administrasi dan materi, bisa dengan adanya pelatihan bimtek dan sosialisasi terkait hal tersebut.
3. Mengusulkan Anggaran penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas ruang kerja pegawai, sarana alat pendukung kinerja pegawai seperti Laptop, PC, Printer dan kendaraan dinas serta kualitas pendukung seperti toilet, taman, ruang bermain anak, ruang menyusui dan alat pendingin.
4. Dalam hal pelayanan kehumasan dan keprotokolan perlu adanya fasilitasi pengaduan masyarakat ke Pemerintah Kota Banjarbaru, misal dengan adanya aplikasi dan/atau nomor khusus pengaduan beserta adminnya.
8. Penyusunan Anggaran dengan Perencanaan yang sesuai kebutuhan dalam Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Liang Anggang.

B. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah, terdapat beberapa penambahan struktur Sub Kegiatan, penggunaan kode rekening serta kodefikasinya.

Mengacu pada penyusunan Renstra Perangkat Daerah, struktur jenis belanja juga merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun

2019 tersebut dimana tidak ada kategori Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL), namun hanya ada Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Pada Renja Tahun 2024, Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru melaksanakan 4 (empat) Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Selanjutnya pada tahun 2024, jumlah kegiatan pada Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru berjumlah 12 (dua belas) Kegiatan, yang terdiri dari:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Penunjang Pemerintahan Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
9. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
10. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
11. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
12. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pada tahun 2024, kebutuhan anggaran Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dalam Rancangan Awal Perubahan Renja dan telah diinput di aplikasi SIPD-RI Kemendagri sebesar Rp 9.858.193.720,00 (sembilan milyar delapan ratus lima puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD 2024 tanggal 4 Oktober 2024 telah ditetapkan besaran Pagu Indikatif Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru tahun 2024 sebesar Rp. 11.876.148.750 (sebelas milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2024 terdiri dari 4 (dua) Program, 12 (dua belas) Kegiatan, dan 30 (tiga puluh) Sub Kegiatan.

Berikut adalah tabel kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Tabel 5.1

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan pada Rancangan Akhir
Perubahan Renja Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru Tahun 2024

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
		3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	6.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor

				9.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
				10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
				11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				13	Pengadaan Mebe
				14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				15	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				16	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
				20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

				22	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	8.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
				25	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
		9.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				27	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	10	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	28	Evaluasi Kelurahan
		11	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
----	---	----	--	----	--

Selanjutnya Rancangan Akhir Renja Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru Tahun 2024 (target capaian kinerja dan kebutuhan dana) serta prakiraan maju Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Liang Anggang
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kota Banjarbaru

Kecamatan Liang Anggang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	UNSUR KEWILAYAHAN				9.858.193.720				9.417.606.132
	KECAMATAN				9.081.063.720				9.417.606.132
7.01.01.2.01	Perencanaan, Pengagaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				271.399.750				275.397.600
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	KECAMATAN LIANG ANGANG	3 Dokumen	4.999.750	APBD KOTA BANJAR BARU		3 Dokumen	15.000.000
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		2 Laporan	266.400.600			2 Laporan	260.397.600
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.251.662.150				6.485.973.932
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima		54 Orang/bulan	6.243.423.800			54 Orang/bulan	6.471.311.932

	ASN	Gaji dan Tunjangan ASN							
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	4.999.850			1 Laporan	10.000.000
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulan/Triwulan/Semester	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		4 Laporan	4.238.500			4 Laporan	4.662.000
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				7.697.500				3.980.500
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	7.697.500			4 Laporan	3.980.500
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				181.253.300				152.193.100
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	105.227.000			3 Paket	15.410.000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	70.259.500			6 Paket	83.669.500
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		1 Paket	5.765.800			2 Paket	6.917.600
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		1 Dokumen	1.980.000			1 Dokumen	1.980.000
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		4 Laporan	44.250.000			4 Laporan	44.216.000

KECAMATAN LIANG ANGGANG

APBD KOTA BANJAR BARU

7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			125.050.600			291.478.000
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	13.709.600		6 Unit	78.117.000
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65.543.000		6 Unit	213.361.000
7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0			0
7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		31.170.000			0
7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	14.628.000		1 Unit	60.580.000
7.01.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang Urusan pemerintahan daerah			199.681.020			253.207.800
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	68.400.000		2 Laporan	72.000.000
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	131.281.020		5 Laporan	181.207.800
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			147.819.450			227.000.500
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.863.700		1 Unit	69.524.000

7.01.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		6 Unit	98.705.750			7 Unit	92.226.500
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	2.000.000			5 Unit	5.050.000
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			730.900.000			1 Unit	60.200.000
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	1.250.000				-
7.01.02.2.01	Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ditingkat kecamatan				1.479.204.000				1.516.047.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	KECAMATAN LIANG ANGGANG	10 Dokumen	1.479.204.000	APBD KOTA BANJAR BARU		10 Dokumen	1.516.047.000
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				118.083.250				153.093.000
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan Non usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		12 Dokumen	31.399.700			10 Dokumen	35.550.000
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	52.500.000			10 Laporan	81.993.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		12 Laporan	34.183.550			10 Laporan	35.550.000

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				7.968.000				12.821.000
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		1 Laporan	7.968.000			1 Laporan	12.821.000
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				104.931.000				121.343.000
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		3 Lembaga Kemasyarakatan	104.931.000			12 Lembaga Kemasyarakatan	121.343.000
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				186.314.700				178.278.500
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		12 Laporan	186.314.700			2 Laporan	178.278.500
JUMLAH					9.858.193.720				9.731.393.932

BAB VI

PENUTUP

Tersusunnya Penjelasan umum Rencana Kinerja Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 ini sebagai pedoman pelaksanaan kerja kedepan, sehingga program dan kegiatan diharapkan dapat terealisasi dengan baik sesuai jadwal kegiatan dan anggaran yang tersedia.

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Liang Anggang tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi segala kebutuhan kantor dan administrasi perkantoran, serta sarana prasarana yang dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat sehingga dapat menjalankan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan secara umum dengan baik dan benar.

Dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana kantor, sumber daya manusia dan anggaran belanja yang diberikan kami tetap melaksanakan tugas semaksimal mungkin serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kami menyadari Rencana Kinerja ini masih jauh dari harapan mengingat keterbatasan anggaran yang ada, oleh karenanya Rencana Kinerja tersebut selalu mengalami perubahan dan perbaikan setiap tahun untuk menuju kearah yang lebih baik.

Liang Anggang , Nopember 2024

Camat Liang Anggang

TAUFIK PURWANTO, S. STP. M. AP

Pembina

NIP.19831229 200212 1 001